

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu gender bukanlah hal yang baru dalam masyarakat internasional. Tujuan menghapuskan ketidaksetaraan gender telah menempati posisi penting dalam organisasi internasional dan pernyataan strategi nasional.¹ Kesetaraan gender menjadi poin penting yang diperjuangkan dalam tatanan internasional melalui kerangka *Millenium Development Goals* (MDGs) nomor tiga dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) nomor lima, sehingga segala bentuk ketidaksetaraan gender menjadi agenda utama dalam penghapusannya.²

Feminis ilmu hubungan internasional, mendefinisikan gender sebagai konstruksi sosial terhadap peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, termasuk karakteristik yang menentukan maskulin dan feminin.³ Pada jangka waktu yang lama, sosialisasi gender kemudian disebut sebagai ketentuan Tuhan dan dianggap bersifat biologis yang tidak dapat diubah serta dianggap kodrat laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender merupakan kondisi yang pada umumnya menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih baik dalam hierarki sosial, ekonomi, dan politik di tengah masyarakat, walaupun dalam beberapa situasi, laki-laki juga dibebankan dengan karakteristik maskulin yang seharusnya dimiliki sehingga melahirkan ekspektasi yang tidak sehat. Terdapat beberapa bentuk ketidaksetaraan gender yang dialami perempuan, seperti pelabelan negatif, kekerasan, marginalisasi, subordinasi, beban ganda, bahkan yang lebih ekstrem tidak jarang perempuan mengalami *femicide*.⁴

¹ Humanity Divided. *Confronting Inequality in Developing Countries Gender Inequality*. Diakses melalui <https://www.undp.org>. Pada 1 April 2021 pukul 18.31.

² Wahyuningsih. *Millenium Development Goals (MDGs) dan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Kesejahteraan Sosial*. Jurnal Bisnis dan Manajemen. Vol. 11, No.3, 2017.

³ John Baylis, Steve S., and Patricia Owens. *The Globalization of World Politics*. Oxford University. 2014.

⁴ Siti Rokhimah. *Patriakhisme dan Ketidakadilan Gender*. Jurnal Kajian Gender, Vol. 6, No. 1, 2014, hal. 12.

Femicide merupakan bentuk pembunuhan yang disengaja terhadap perempuan atau anak perempuan yang didasarkan atas sikap penghinaan, misogini, rasa kepemilikan atau kesenangan. Salah satu negara dengan tingkat *femicide* yang tinggi adalah Meksiko, Meksiko dinilai tidak aman untuk perempuan karena kecenderungan terjadinya kekerasan seperti *femicide*⁵ dengan angka yang tinggi.⁶ Pada tahun 2004-2006 Meksiko mengalami peningkatan kasus *femicide* ditunjukkan dengan tingginya laporan pembunuhan dan penghilangan perempuan.⁷

Melihat hal ini pemerintah Meksiko merespon dengan menerbitkan Undang-Undang *La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violence* pada tanggal 1 Februari 2007. Isi dari undang-undang ini mengatur segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan berisi langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah. Selanjutnya pemerintah menetapkan tindakan *femicide* sebagai tindakan kriminal yang disahkan pada tanggal 14 Juni 2012 dalam Undang-Undang Hukum Pidana Federal Pasal 325 yang mengatur tujuh protokol dalam menetapkan kasus kekerasan *femicide* serta menetapkan sanksi bagi penghalang penyelidikan, dan pelaku dengan kurungan penjara 40 tahun hingga 60 tahun. Namun upaya ini tidak berhasil karena setelah melakukan investigasi di seluruh negeri di Meksiko dari 2015-2017, tercatat jumlah kasus *femicide* meningkat sebanyak 72%.⁸

⁵ Janice Joseph. Victims of Femicide in Latin America: Legal and Criminal Justice Response, TEMIDA, Vol. 20, No. 1, 2017, hal. 4.

⁶ Statista. *Femicide Rate in Selected Countries in Latin America* 2019. Diakses <https://www.statista.com/statistics/1102327/femicide-rate-latin-america-by-country/> Pada 1 April 2021

⁷ CMDPDH. *Femicide and Imunity in Mexico : A Context of Structural and Genearlized Violence*. Diakses Melalui https://www.ecoi.net/en/file/local/1085985/1930_1343058124_cddandcmdpdh-forthesession-mexico-cedaw52.pdf pada 13 April 2021

⁸ Atlantic Council. Women Protes for Their Lives : Fighting Femicide in Latin America. Diakses melalui <https://www.atlanticcouncil.org/content-series/diversity-equity-inclusion/women-protest-for-their-lives-fighting-femicide-in-latin-america/> Pada April 6, 2021.

Gambar 1.1: Statistik Kasus *Femicide* di Meksiko 2015-2019.



Sumber : *Secretary of Citizen's of Security and Protection of Mexico & the Executive Secretariat of the National System of Public Security of Mexico.*

Upaya lain yang dilakukan pemerintah Meksiko ialah ikut bergabung dengan kampanye He for She yang bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender di dunia melalui pendekatan sistematis dengan platform yang ditargetkan, sehingga *audience* global dapat terlibat menjadi agen perubahan untuk mencapai kesetaraan gender.⁹ Pada kampanye ini dibutuhkan keterlibatan kaum pria dan anak laki-laki sebagai agen perubahan dengan mendorong mereka untuk mengambil tindakan terhadap ketidaksetaraan yang dihadapi oleh kaum perempuan dan anak perempuan.¹⁰ Kampanye He for She bisa diikuti dengan mendaftar di *website* resmi He for She, dan ketika sebuah negara telah ikut berkomitmen dan bergabung menandakan bahwa mereka telah mendukung program kampanye tersebut.

Kampanye He for She didirikan oleh UN Women Goodwill yaitu bagian dari UN Women dengan bentuk agensi yang lebih kecil. UN Women merupakan organisasi yang didasarkan dengan visi kesetaraan dan tercantum dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kampanye He for She didirikan pada 20

⁹ UN Women. Emerging Solutions For Gender Equality 2018, melalui <https://www.heforshe.org/sites/default/files/201810/HeForShe%20Emerging%20Solutions%20Report%202018%20-%20Full%20Report.pdf> Diakses pada 1 April

¹⁰ Andi Reskiwardina. Peran *HeForShe Campaign* Terhadap Perkembangan Pergerakan Perempuan dan Isu Keterlibatan Laki-Laki dalam Memajukan Kesetaraan Gender Indonesia, melalui <http://digilib.unhas.ac.id> Diakses pada 2 April 2021

September 2014 di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat.¹¹ Peresmian tersebut dipandu oleh Sekretariat Jenderal PBB Ban Ki Moon dan Duta Besar untuk UN Women Emma Charlote Watson. Meksiko bergabung pada 22 Februari 2016.¹² Pada pidatonya Presiden Meksiko menyatakan bahwa He for She sebagai alat untuk menghentikan diskriminasi, kekerasan, pengucilan, dan ketidakadilan pada perempuan. Meksiko sendiri tercatat sebagai lima negara *leader* pada program kampanye He for She. Negara *leader* diartikan sebagai negara dengan jumlah terbanyak orang yang berkomitmen atau bergabung pada awal peluncuran program He for She lima negara tersebut yakni India dengan jumlah 220.000 orang, Rwanda 200.000 orang, Congo-Kinshasa 170.000 orang, Amerika Serikat sebanyak 150.000 orang, dan Meksiko dengan jumlah 130.000 orang.¹³

Berdasarkan data yang diperoleh melalui hasil publikasi laporan *Obsevatorio Ciudadano Nacional del Femicidio* (OCNF) pada tahun 2015-2017 dan laporan Pemerintah Federal hingga tahun 2019 kasus pembunuhan perempuan berbasis gender atau *femicide* di Meksiko terus mengalami peningkatan.¹⁴ Meksiko menjadi negara dengan kasus *femicide* yang meningkat dengan cepat dibandingkan dengan lainnya seperti Honduras dan Guatemala. Maka dengan meningkatnya kasus *femicide* tersebut, pemerintah Meksiko dinilai telah gagal mengimplementasikan kampanye He for She yang memiliki tujuan utama mengubah perilaku diskriminatif dan membangun kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender.

¹¹ Emma Watson. *Gender Quality is Your Issue too*, melalui Diakses <https://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/9/emma-watson-gender-equality-is-your-issue-too> pada 2 April, 2021

¹² Elma Gonzales. 2016. *He For She Campaign Gains Momentum in Mexico*. Diakses melalui <https://www.heforshe.org/en> pada 2 April, 2021

¹³ He For She. *Emerging Solutions for Gender Equality 2018*. Diakses melalui <https://www.forshe.org/en> pada 12 April 2021

¹⁴ Atlantic Council. *Women Protes for Their Lives : Fighting Femicide in Latin America*. Diakses melalui <https://www.atlanticcouncil.org> Pada April 6, 2021.

1.2 Rumusan Masalah

Meksiko merupakan salah satu negara dengan kasus *femicide* tertinggi, selain membentuk aturan di bidang hukum, Meksiko juga bergabung dengan He for She *campaign* pada 22 Februari 2016 dan menjadi salah satu dari lima negara *leader*. Presiden Meksiko melalui pidatonya berharap He for She *campaign* dapat menghentikan tindakan diskriminasi, kekerasan, pengucilan, dan ketidakadilan pada perempuan di Meksiko. Dari enam aksi spesifik sebagai saran perubahan positif menuju kesetaraan gender yang tertulis di *website* He for She seperti aksi di bidang pendidikan, kesehatan, identitas, pekerjaan, kekerasan, dan politik. Meksiko fokus dalam menerapkan aksi kelima yaitu aksi di bidang melawan kekerasan.¹⁵ Namun, berbagai upaya yang dilakukan Meksiko belum menunjukkan hasil yang signifikan hal tersebut dibuktikan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Observatorio Ciudadano Nacional del Femicidio (OCNF) dan pemerintah federal yang menunjukkan kasus kekerasan berbasis gender hingga menyebabkan kematian atau *femicide* terus meningkat.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka pertanyaan pada penelitian ini adalah “Apa bentuk kegagalan implementasi He for She *campaign* dalam mengatasi kasus *femicide* di Meksiko?”

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk kegagalan dalam pengimplementasian He for She *campaign* dalam mengatasi kasus *femicide* di Meksiko.

¹⁵ Alfin Ayuningtiyas. Impelementasi Kampanye *He for She* dalam Menyikapi Kekerasan Seksual dan Dampaknya Terhadap Perubahan Pola Pikir Perempuan dan Laki-Laki Meksiko. Diakses melalui <http://eprints.umm.ac.id> Pada 10 Mei 2021

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Secara akademis penelitian ini menawarkan perihal pengetahuan dan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama untuk mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional khususnya dalam memahami bentuk kegagalan Meksiko dalam mengimplementasikan *He for She campaign* di Meksiko.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

1.6 Studi Pustaka

Penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik pembahasan atau kesamaan pola dalam penyelesaian kasus sehingga dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi tambahan. Beberapa referensi tersebut antara lain :

Studi pustaka pertama oleh Irma Klipic dengan judul *Government Responses to Femicides in Latin America*.¹⁶ Tulisan ini menjelaskan upaya hukum dan kebijakan negara-negara di Amerika Latin dalam mengatasi kasus *femicide*. Pada tahun 1993 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan diciptakan dengan tujuan negara berkewajiban untuk mencegah, menyelidiki, dan menghukum kekerasan perempuan. Pada tahun 2015, 16 negara di Amerika Latin menerapkan undang-undang terkait *femicide* dengan hukuman yang lebih ketat untuk pelaku *femicide* yakni Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Konvensi Inter-Amerika tentang Pencegahan, Hukuman, dan Pemberantasan Kekerasan terhadap Perempuan, dan Konvensi *Belém do Pará*. Konvensi ini

¹⁶ Irma Klipic. *Government Responses to Femicides in Latin America*. Diakses melalui <http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1247379/FULLTEXT01.pdf> Pada 4 Mei 2021

dirancang khusus untuk Amerika Latin dalam menyelidiki dan mencegah *femicide*, banyak negara Amerika Latin telah meratifikasi konvensi tersebut.

Dari negara-negara di Amerika Latin dan global seperti Costa Rica, Chili, Argentina, Brasil, dan Meksiko permasalahan *femicide* salah satunya adalah kurangnya data, baik dari pihak medis maupun aparat kepolisian, karena negara terpilih yang diteliti berbeda motif kekerasannya dan informasi penting tentang kasus *femicide* sering hilang. Kontribusi tulisan ini ialah melihat bagaimana upaya negara-negara di Amerika Latin dalam mengatasi *femicide* khususnya dibidang hukum serta hambatan yang dihadapi dalam penegakkan hal tersebut.

Referensi berikutnya berjudul *The Education for Gender Equality and Human Rights in Indonesia* yang ditulis oleh Ayu Maulidina Larasati dan Novia Pupa Ayu.¹⁷ yang menjelaskan upaya Indonesia dalam mengatasi permasalahan ketidaksetaraan gender karena rendahnya keterlibatan perempuan pada bidang ekonomi dan politik serta permasalahan diskriminasi terhadap perempuan. Upaya yang dilakukan Indonesia. Pertama, meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Kedua, menetapkan strategi pengarusutamaan gender yang dikukuhkan dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 9 Pada Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Ketiga, memperbarui peraturan perundang-undangan serta menyesuaikan dengan ratifikasi konvensi/konvenan yang telah dilakukan sebelumnya. Keempat, mengesahkan RUU Kewarganegaraan RI oleh DPR pada 11 Juli 2006 yang menggantikan UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI menjadi UU Nomor 12 Tahun 2006, yang mana undang-undang tersebut telah memberikan

¹⁷ Ayu Maulidina, Novia Puspa Ayu. *The Education for Gender Equality and Human Rights In Indonesia*. Diakses melalui <https://journal.unnes.ac.id>

dampak yang cukup baik dalam menghapus tindakan diskriminatif. Kelima, mengesahkan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Referensi ini menjadi penting bagi peneliti dalam membandingkan bagaimana upaya hukum Indonesia dalam mengatasi ketidaksetaraan gender sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

Tulisan oleh Jusmalia Oktaviani dan Siti Muti'ah Setiawati yang berjudul Kebijakan India dalam Mengatasi *Dowry Deaths*.¹⁸ menjelaskan bagaimana upaya pemerintah India menghadapi kasus *dowry deaths* atau mahar yang menyebabkan terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan di India. Hal ini dapat menimbulkan kekerasan bahkan pembunuhan terhadap perempuan ketika sang istri tidak mampu memenuhi jumlah mahar yang sesuai dengan kemauan suami dan keluarganya. Kekerasan terus menerus menyebabkan sang istri bunuh diri bahkan dibunuh oleh suami dan keluarganya namun pembunuhan tersebut disamakan sebagai bunuh diri. Pembunuhan tersebut bertujuan agar sang laki-laki bisa menikah dan menerima mahar lagi. Melihat adanya kekerasan berbasis gender ini pemerintah India menetapkan undang-undang anti mahar yang pertama yaitu *the Dowry Prohibition Act 1961*, *The Dowry Prohibition Amandement Act of 1984*, *The Criminal Law Act of 1983* dan aturan lain seperti *Protection of Women dari Domestic Violence Bill 2005* diamandemen menjadi *The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005* yang menyediakan pertolongan cepat dan darurat bagi wanita yang mengalami kekerasan.

Pada implementasinya, India sebenarnya telah menggunakan hampir seluruh instrumen kebijakan publik, baik aturan, sanksi atau hukuman, bujukan, peningkatan kapasitas melalui pendidikan atau sebagainya. Namun, kebijakan pemerintah India

¹⁸ Jusmalia Oktaviani dan Siti Muti'ah. Kebijakan India dalam Mengatasi *Dowry Deaths*. Vol. 2, No. 1. Diakses Melalui <http://fisip.unjani.ac.id> pada 7 Mei 2021.

dalam menanggulangi *dowry deaths* ini ternyata kurang efektif karena jumlah korban tidak berubah secara signifikan. Hal ini disebabkan karena dari aparat kepolisian kurang tegas dalam menerapkan hukum yang sudah ada karena di masyarakat maupun aparat kepolisian pun terdapat sistem patriarkal dan kasta yang telah mengakar. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan yang diterapkan tidak hanya bisa berfokus pada penegakan hukum pada kekerasan langsung saja namun juga harus penerapan pada kekerasan kultural dan struktural. Penting bagi peneliti melihat bagaimana upaya India dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan, yang menerapkan tidak hanya di bidang hukum namun juga ada hukum dalam bidang agama seperti agama Hindu. Walaupun belum ada hukum yang mampu mengatur di bidang kekerasan kultural dan struktural, namun hal tersebut dapat menjadi tambahan analisis bagi peneliti dalam melihat perbandingan bentuk penerapan hukumnya.

Tulisan berikut yang menjadi referensi bagi penelitian ini adalah karya dari Janice Joseph yang berjudul *Victims of Femicide in Latin America : Legal and Criminal Justice Responses*.¹⁹ yang menyajikan data mengenai tanggapan dan hambatan penegakkan hukum tentang *femicide* yang terjadi di negara-negara Amerika Latin. Menghadapi *femicide* negara-negara di Amerika Latin menetapkan hukum yang bervariasi, seperti Argentina dan Chile yang menetapkan hukum penjara seumur hidup diberlakukan mulai dari tahun 2012, Meksiko dengan penjara 40 dan 60 tahun penjara denda sebanyak US \$2.000. Di sebagian besar negara Amerika Latin masih minimnya penanganan permasalahan kekerasan gender, aparat penegakan hukum sering mengklaim bahwa *femicide* merupakan tindakan yang spontan atau yang tidak disengaja.

¹⁹ Janice Joseph. *Victims of femicide in Latin America: Legal and Criminal Justice Responses*. Vol.2.2017. Diakses melalui <http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/1450-6637/2017/1450-66371701003J.pdf> pada 22 April 2021

impunitas dan akuntabilitas masih sering terjadi di Amerika Latin. Pada tahun 2012-2013 sebanyak 3800 perempuan meninggal karena kekerasan berbasis gender di Meksiko. Namun dari banyaknya kasus tersebut hanya 613 kasus yang diselidiki dan 1,6% berakhir dengan hukum yudisial. Alasan terjadinya impunitas, pertama adanya pengancaman hakim yang diintimidasi oleh pembunuh, menyuap politisi dan anggota dari sistem peradilan pidana yang kurang peduli dengan kematian perempuan. Kedua, kurang kebijakan dan mekanisme untuk menangani kekerasan berbasis gender di banyak negara. Ketiga, sikap kepasifan dan keengganan oleh otoritas untuk menyelidiki kejahatan. Faktor lainnya karena pihak keluarga korban yang tidak melaporkan karena tidak percaya dengan sistem peradilan.²⁰ Kontribusi tulisan ini bagi penulis ialah untuk melihat mengenai bagaimana tanggapan dan hambatan penegakkan hukum di Amerika Latin dalam menangani kasus *femicide*.

Nobel Women's Initiative dengan judul *From Survivors to Defenders*.²¹ menjelaskan tentang banyaknya kekerasan yang terjadi di Meksiko dan mengatakan bahwa *femicide*, kekerasan seksual, pemerkosaan, penghilangan paksa, dan penyerangan terhadap perempuan yang melapor di Meksiko, Honduras, dan Guatemala mencapai dimensi krisis. Di Meksiko *femicide* meningkat 40% sejak 2006 menyebabkan adanya tindakan *femicide* sehingga lebih dari 50.000 orang tewas, 250 orang mengungsi dan ribuan tidak ditemukan. Lebih dari 95% kejahatan dari ketiga negara tersebut tidak pernah dihukum, kasus-kasus tersebut tidak pernah diselidiki oleh pihak berwenang. Bahkan pengadilan secara rutin mendiskriminasi perempuan dan melecehkan yang mengajukan tuntutan atau petisi keadilan.²²

²⁰ Musalo, K., Pellegrin, E., Roberts, S. S. Crimes Without Punishment : Violence Againsts Women In Guatemala. Hasting Women's Law Journal. Hal. 161-221

²¹ Nobel Womens Initiative. *From Survivors to Defenders*. 2012. melalui https://nobelwomensinitiative.org/wpcontent/uploads/2012/06/Report_AmericasDelgation20121.pdf?ref=218 Diakses pada 3 April 2021 pukul 17:29

²² *Nobel Womens Initiative*, hal 10.

Perempuan di Meksiko menyebutkan susahnya akses untuk melaporkan kekerasan yang dialami. Hal tersebut dikarenakan pihak tentara dan polisi melakukan penahanan dan hukuman kepada perempuan yang melapor, sehingga munculnya ketakutan untuk melaporkan tindak kekerasan yang terjadi. Kontribusi tulisan ini bagi peneliti adalah untuk memperkuat analisis mengenai penyebab tingginya kasus *femicide* yang terjadi di Meksiko.

1.7 Kerangka Konseptual

1. Konsep *Policy Failure*

Konsep *policy failure* digunakan untuk menganalisa kriteria mengenai definisi kegagalan dan penyebab dari suatu kebijakan. McConnell menyebutkan bahwa kegagalan adalah fakta objektif, makna kegagalan adalah ketika disandingkan dengan niat awal pemerintah, namun hal tersebut tidak bisa diatasi sehingga menimbulkan risiko yang tinggi termasuk kepada pelanggaran hak asasi manusia.²³ Gagalnya suatu kebijakan tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal, menurut Bovens dan Hans menyebutkan kegagalan tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, pemimpin yang buruk, ataupun kualitas individu. Melainkan permasalahan sosial dan politik yang dapat diamati karena fakta dari suatu implementasi kebijakan. Bovens dan Hans menyebutkan sumber-sumber yang tidak disengaja dalam menilai suatu kebijakan, sumber tersebut seperti, nilai, posisi, kepentingan, waktu, dan budaya.²⁴ Hal ini berhubungan dengan penyebab tingginya angka kekerasan yang ada di Meksiko.

Menurut McConnell dalam melihat kegagalan kebijakan dapat melalui tiga aspek yakni proses, program, dan politik. Pada aspek proses yaitu disebutkan bahwa

²³ Allan A McConell. Why do Policies Fail : A Starting Point for Exploration. Diakses melalui <https://www.psa.ac.uk/sites/default/files/conference/papers/2014/McConnell%20Policy%20PSA%20April%202014.pdf> Pada 3 Mei 2021.

²⁴ Mark Bovens and Paul 't Hart. Revisiting the Study of Policy Failures. 2016. Hal.2-3.

adanya proses dalam mengidentifikasi masalah, memeriksa alternatif kebijakan yang potensial, dan berkonsultasi sesuai atau tidak pada permasalahan yang dihadapi. Semua kegiatan tersebut melibatkan pertimbangan pro dan kontra seperti siapa, kapan, dan bagaimana berkonsultais dan menimbang peluang. Aspek program adalah program yang dilaksanakan oleh dengan memanfaatkan kebijakan, perangkat, dan pengeluaran publik. Aspek politik adalah dampak dari aspek program yang yang telah dilaksanakan, aspek ini melihat bagaimana dampak dan agenda pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan.²⁵ Pada garis bearnya kebijakan proses diartikan sebagai proses untuk menghasilkan kebijakan, sedangkan kebijakan program merupakan hasil dari kebijakan, program tersebut dirancang guna memenuhi tujuan yang didukung oleh peran pemerintah yang tepat dalam masyarakat. Kebijakan politik yaitu peran seperti mengelola konflik, menghadirkan proses bisnis dan menetapkan visi. Penulis akan menganalisa tiga aspek tersebut.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif analisis, metode ini menggunakan bahasa penelitian yang berbentuk kualitatif dan digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena yang dikaji secara mendalam. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan disusun dengan berlandaskan pada teori dan konsep yang digunakan. Peneliti memahami lebih mendalam tentang fenomena yang menjadi fokus kajian peneliti.

²⁵ Allan McConnel. Policy Success, Policy Failure, and Grey Area in- Between. Diakses melalui <https://www.researchgate.net>.

1.8.2 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak melebar dari rumusan masalah, peneliti membatasi penelitian ini dari tahun 2016 yang mana pada saat itu Meksiko mulai bergabung dengan program *He For She campaign* hingga tahun 2019 yang mana pada tahun tersebut terjadinya puncak *femicide* paling tinggi di Meksiko dan disebut sebagai tahun paling kejam yang pernah tercatat di Meksiko.²⁶

1.8.3 Unit Analisis, Unit Eksplanasi, dan Tingkat Analisis

Unit analisis merupakan objek dan perilaku yang akan diteliti sedangkan unit eksplanasi adalah dampak dan pengaruh dari objek yang akan diteliti.²⁷ Unit analisis dalam penelitian ini adalah kegagalan Meksiko dalam mengimplementasikan *He for She campaign*, sedangkan unit eksplanasi ialah kasus *femicide* di negara tersebut. Penelitian ini menggunakan level analisis negara.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka yang diambil dari beberapa sumber seperti buku dari studi ilmu hubungan internasional terkait pembahasan, jurnal-jurnal ilmiah yang diperoleh penulis dari sumber yang relevan. Data yang diambil peneliti berasal dari laman www.heforshe.org yang berisikan data-data mengenai *He for She campaign* dan laporan kemajuan negara-negara dalam menghadapi ketidaksetaraan gender di dunia. Peneliti juga memperoleh data dari *website Secretary of Citizen's of Security and Protection of Mexico & the Executive Secretariat of the National System of Public Security of Mexico* yang menunjukkan

²⁶ Linnea Sandin. *Femicides in Mexico : Impunity and Protests*. Diakses melalui <https://www.csis.org/analysis/femicides-mexico-impunity-and-protests> pada 3 Mei 2021

²⁷ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1990), 39, Diakses melalui <https://www.scribd.com/document/381522834/Ilmu-Hubungan-Internasional-Mohtar-Mas-oed-pdf>. pada 29 April

angka kasus *femicide* di Meksiko. Selain itu peneliti juga memperoleh data dari buku, jurnal, dokumen resmi, laporan resmi, laman *website*, dan berita *online*.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Pada tahap awal, peneliti mengumpulkan data yang berhubungan dengan He for She dan kasus *femicide* di Meksiko, analisis data yang akan dilakukan peneliti yaitu data terkait bentuk kegagalan Meksiko dalam implementasi He for She *campaign*. Selanjutnya untuk dapat melihat bagaimana bentuk-bentuk kegagalan kebijakan yang dilakukan Meksiko dalam pengimplementasian tersebut, peneliti menggunakan konsep *policy failure*, dari tiga aspek yang ada yakni proses, program, dan politik. Peneliti menggunakan aspek program karena pada aspek tersebut dapat melihat bagaimana hasil dari sebuah kebijakan.

Terdapat tiga derajat kegagalan kebijakan yaitu kegagalan yang bisa ditoleransi (*tolerable failure*), kegagalan konflik (*conflicted failure*), dan kegagalan langsung (*outright failure*). Pada setiap derajat kegagalan kebijakan tersebut terdapat lima indikator yang akan peneliti kelompokkan dengan data yang telah dikumpulkan, kemudian peneliti akan menganalisis data tersebut sehingga didapatkan hasil apa saja bentuk-bentuk kegagalan kebijakan dalam implementasi He for She *campaign* dalam mengatasi kasus *femicide* di Meksiko.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan alasan peneliti tertarik melakukan analisis terhadap kegagalan Meksiko dalam implementasi He For She *campaign* dalam mengatasi permasalahan *femicide*. Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, teori, konsep, serta metodologi, dan sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II *Femicide* di Meksiko

Bab ini menjelaskan bagaimana keadaan *femicide* di Meksiko dan upaya-upaya yang dilakukan Meksiko dalam mengatasi *femicide*.

BAB III Implementasi He for She

Pada bab ini menjelaskan bentuk dari pengimplementasian He for She *campaign* di Meksiko.

BAB IV Analisis kegagalan pemerintah Meksiko dalam He for She Campaign

Pada bab ini menjelaskan analisis kegagalan implementasi He for She *campaign* dengan menggunakan konsep *policy failure* dari McConnell.

BAB V Penutup

Bab ini berisikan ringkasan dari keseluruhan pembahasan dari hasil penelitian ini sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini.

